

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pada awal Orde Baru program pemerintah semata-mata diarahkan pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama berupa usaha memberantas inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Keadaan ini berbeda dengan keadaan pada masa Orde Lama, dimana pemerintah lebih menitikberatkan pada pembangunan politik daripada pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan karena pada masa Orde Lama merupakan masa perbaikan pasca penjajahan dimana situasi politik Indonesia belum stabil. Sehingga pembangunan ekonomi baru bisa pemerintah Orde Lama laksanakan pada tahun 1950-an (Hakim, 2012, hlm. 165). Pada masa Orde Lama, pada tahun 1963, perpolitikan Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, hal ini dapat dilihat dengan keberhasilan Indonesia dalam memenangkan kembali Irian Barat. Namun disamping itu, Indonesia harus menghadapi masalah lain yakni inflasi dan korupsi yang muncul karena perkembangan ekonomi Orde Lama tidak terawasi sejak awal kemerdekaan (Hakim, 2012, hlm. 166).

Masalah di ataslah yang menyebabkan program pemerintah Orde Baru diarahkan pada pembangunan ekonomi nasional. Namun, kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi sekitar 650% setahun tidak memungkinkan pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu (Notosusanto, 1993, hlm. 430).

Sebagai upaya stabilitasi dan rehabilitasi ekonomi, pemerintah mengadakan pembaharuan landasan ekonomi, yakni dari ekonomi terpimpin ke arah demokrasi ekonomi. Landasan demokrasi ekonomi ini disusun atas dasar kekeluargaan, jadi tidak mengenal pertentangan kelas. Karena itu mempunyai konsekuensi keharusan adanya pengawasan rakyat terhadap kekayaan negara (Notosusanto, 1993, hlm. 432).

Dengan berubahnya landasan ekonomi dari ekonomi terpimpin ke demokrasi ekonomi, maka pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki prakehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Hal ini dilakukan karena berkenaan dengan demokrasi ekonomi sendiri yang mengutamakan kemakmuran rakyat. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan impor. Sesuai dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan penting, salah satunya adalah peraturan 3 Oktober 1966, yang memuat pokok-pokok usaha antara lain:

1. Anggaran belanja yang berimbang (*balance budget*) untuk meniadakan salah satu sebab bagi inflasi, yaitu defisit dalam anggaran belanja;
2. Pengekangan ekspansi kredit untuk usaha-usaha produktif, khususnya dibidang pangan, ekspor, prasarana dan industri;
3. Penundaan pembayaran hutang-hutang luar negeri (*rescheduling*) dan usaha untuk mendapatkan kredit baru;
4. Penanaman modal asing guna membuka kesempatan pada luar negeri untuk turut serta membuka alam Indonesia, membuka kesempatan kerja serta membantu usaha peningkatan pendapatan nasional (Notosusanto, 1993, hlm. 434).

Dari peraturan 3 Oktober 1966 di atas pada poin ke-4, muncul mengenai penanaman modal asing di Indonesia, kemudian pemerintah Orde Baru mempertegas lagi mengenai penanaman modal asing dengan mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang tentang penanaman modal asing pada tanggal 10 Februari 1967. Indonesia yang pada 10 tahun terakhir pemerintahan Orde Lama menentang penanaman modal asing kini mengeluarkan undang-undang guna menarik modal asing untuk memperbaiki perekonomiannya. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan di bawah ini:

Pada tahun-tahun pertama pemerintahan Orde Baru, pemerintah membuat suatu perubahan kebijakan modal asing yang sangat penting. Setelah satu dasawarsa melakukan nasionalisasi dan bermusuhan dengan penanaman modal asing khususnya dengan negara-negara Barat, salah satu keputusan pertama Orde Baru adalah dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1/1967. Sebagai upaya untuk mengembalikan kredibilitas negara terhadap luar negeri-dan untuk menarik modal asing- Undang-Undang baru tersebut merupakan suatu undangan bagi para penanam modal asing dengan persyaratan-persyaratan yang minimal (Abdullah, 1991, hlm. 48).

Sejak saat itu, negara-negara asing mulai berdatangan ke Indonesia dan menanamkan modal perusahaannya. Jepang merupakan negara yang paling dominan perannya dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang menanamkan modal di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada hampir semua cabang industri utama di mana investasi asing diperbolehkan, penanaman modal terbesar adalah perusahaan-perusahaan Jepang. Orang-orang Jepang sangat menonjol sejak awal kebijakan investasi baru dan pangsa investasi mereka meningkat dari waktu ke waktu (Abdullah, 1991, hlm. 238).

Dana investasi Jepang pun terus mengalir dan jumlahnya semakin besar setiap tahunnya. Sampai tahun 1973 dana investasi Jepang tercatat senilai US \$ 534 juta untuk 135 proyek, merupakan jumlah proyek terbanyak di Indonesia mengalahkan Amerika Serikat yang memiliki proyek sebanyak 115 proyek. Dana investasi Jepang ini oleh pemerintah digunakan untuk melakukan pembangunan, dana ini kemudian digabungkan dengan pinjaman dana asing. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada periode Presiden Soeharto untuk periode keduanya yaitu Pembangunan Lima Tahun yang dikenal dengan Pelita (Lailah, dkk, 2013, hlm. 2).

Namun, dana investasi asing khususnya dari Jepang dan kucuran pinjaman dana asing yang digunakan pemerintah untuk melakukan pembangunan menuai respon negatif dari masyarakat Indonesia, khususnya dari mahasiswa. Seperti yang disebutkan dalam memorandum yang GMII (Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Indonesia) berikan kepada J.P Pronk, Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda, bahwa:

“Kami tak bangga kepada bantuan asing yang hanya berarti lebih banyak gedung-gedung mentereng menjulang, lebih banyak *nightclub* dan banjir Coca-cola, tetapi di lain pihak makin banyak rakyat tak mendapat pekerjaan, kehilangan tanah, tak punya rumah, industri-industri kecil mati, hutan-hutan menjadi gundul dan ladang minyak menjadi kering” (Hasibuan, 2011, hlm. 44).

Pada tanggal 30 November 1973, mahasiswa melakukan diskusi tentang “Untung Rugi Modal Asing” di Balai Budaya Jakarta. Pada saat itu juga sudah terjadi demonstrasi-demonstrasi sebagai respon negatif mahasiswa terhadap dominasi Jepang dan peran Asisten Pribadi (Aspri) (Hasibuan, 2011, hlm. 46). Selain itu, respon

negatif mahasiswa juga dituangkan kedalam tuntutan-tuntutan dari berbagai gerakan kepada pemerintah. Gerakan-gerakan mahasiswa yang menuntut tersebut diperparah dengan persoalan-persoalan yang muncul. Seperti Sidang Umum MPR April 1973 yang mengangkat Soeharto kembali sebagai Presiden RI, kenaikan harga barang sejak akhir tahun 1972 karena terjadi kekurangan beras akibat buruknya pengelolaan Bulog (Badan Usaha Logistik) (Syukur, 2012, hlm. 353).

Peristiwa lainnya yang cukup menghebohkan adalah terjadinya kerusuhan anti Cina di Bandung. Di samping itu juga timbul berbagai gelombang kontroversi dan protes atas rancangan UU Perkawinan, yang kemudian disahkan pada Desember 1973 sebagai hasil konsesus antara ABRI dan Golongan Islam, serta sekaligus untuk memencilkan kelompok mahasiswa yang menempatkan diri sebagai kelompok oposisi. Selain itu, berhembus isu tentang persaingan di dalam tubuh elite ABRI, antara kelompok Mayjen Ali Moertopo lewat Opsus (Operasi Khusus) dan kelompok Jenderal Soemitro lewat Kopkamtib (Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban) (Syukur, 2012, hlm. 354).

Melihat persoalan dan keadaan seperti di atas, menjadi sebuah kewajaran ketika para mahasiswa menyuarakan tuntutan dan aspirasinya kepada pemerintah demi sebuah perubahan lebih baik kearah yang diinginkan. Karena hal tersebut juga lah aksi-aksi protes di Jakarta dan Bandung meningkat. Mereka menggugat cara pembangunan yang berlandaskan bantuan asing yang akhirnya melahirkan pemerasan negara dan ketidakstabilan sosial, karena orang-orang Jepang dan Cina yang mereka anggap bekerjasama dengan beberapa tokoh nasional “yang menjual negara” (Syukur, 2012, hlm. 354-355). Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani dituding mahasiswa sebagai tokoh nasional “yang menjual negara” juga disebut-sebut sebagai otak dan pelobi utama di balik kebijakan ekonomi Soeharto, yang cenderung lunak terhadap korporasi asing. Sedangkan Soemitro yang merupakan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dianggap menentang modal asing namun tidak menyeruakan penolakan secara terbuka (Astono, 2015, hlm. 46).

Ali Moertopo adalah Asisten Pribadi Presiden Soeharto sekaligus menjabat sebagai Komandan Operasi Khusus (Opsus) (Rahmat, 2011, hlm. 54). Ali Moertopo

juga merupakan tokoh militer kontroversial yang merupakan simpul penting dalam pemerintahan Orde Baru. Mayor Jenderal Ali Moertopo lengkapnya pada waktu itu berposisi sebagai Aspri atau Asisten Pribadi Presiden yang menjadi salah satu tuntutan Tritura jilid II Mahasiswa. Ali dan CSIS (*Centre for Strategic and Internasional Study*) sebagai badan yang berkolaborasi dalam penentuan kebijakan pemerintah sebagai antek-antek imperialis asing. Para mahasiswa itu menuding Ali dan asisten presiden lainnya sebagai antek Jepang (Winy, 2005, hlm. 34-36).

Mayjen Soedjono Hoemardani adalah Asisten Pribadi Presiden Soeharto, yang dipercaya Soeharto untuk melakukan perjalanan ke negara-negara yang dianggap penting bagi Indonesia dalam mencapai stabilitas dan perkembangan ekonomi. Soedjono Hoemardani juga yang memperkenalkan pemerintahan Orde Baru kepada pemerintah Jepang dan berhasil meyakinkan pemerintah Jepang akan pentingnya memperbaiki hubungan dengan Indonesia dan membantu pembangunan yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Dengan kemampuan *lobbying*-nya Soedjono Hoemardani berhasil merintis hubungan baik dengan Jepang. Sebagai wujud permulaan hubungan baik tersebut adalah dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian dengan Jepang yaitu pemerintah Jepang akan memberikan kredit sebesar US\$ 30 juta kepada Indonesia (Wanadi, 1987, hlm. 82).

Sedangkan Jenderal Soemitro merupakan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) (Ramadhan, 1994, hlm. 276). Pada November 1973, Soemitro mengunjungi seluruh Universitas besar di Jakarta, Bandung Surabaya, dan Yogyakarta. Dalam dialog dengan mahasiswa, Soemitro mengakui semakin banyaknya kontradiksi sosial di tengah masyarakat. Ia juga menerima kritikan para mahasiswa yang mempertanyakan dasar hukum Kopkamtib. Di tengah-tengah komunitas mahasiswa itu juga dilontarkan Soemitro tentang perlunya komunikasi timbal balik. Menurut Soemitro, pola kepemimpinan baru itu berlaku efektif sejak tanggal 1 April 1974 (Syukur, 2012, hlm. 355).

Pernyataan Soemitro itu dipandang banyak kalangan sebagai upaya kampanye dirinya sebagai presiden, yang mendapat inspirasi dari penggulingan Marsekal Thanom Kittikachorn pada bulan Oktober 1973 di Thailand oleh para mahasiswa.

Padahal, menurut Soemitro, kedatangannya ke kampus-kampus itu atas perintah Soeharto, setelah ia kembali dari konferensi Non Blok di Aljazair pada akhir tahun 1973. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Soemitro dalam buku *Soemitro (mantan Pangkopkamtib) Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib* karangan Ramadhan K.H bahwa:

Pak Harto cerita tentang keadaan kampus yang resah dan meminta agar saya menenangkan kampus-kampus itu.

Saya jawab “Bersedia, Pak. Tapi ijin kan saya pergi ke Pulau Buru dulu, lalu ke kampus di Jawa Timur (karena saya berasal dari Jawa Timur) Kalau saya berhasil di sana, baru saya akan ke kampus-kampus lainnya.” Pikir saya (Ramadhan, 1994, hlm. 274).

Selain para petinggi negara, tokoh mahasiswa pun ada yang terlibat dalam kemelut perpolitikan dan perekonomian negara, yakni Hariman Siregar. Hariman Siregar pada saat itu merupakan Ketua Dewan Mahasiswa UI yang dilantik pada awal Agustus 1973. Saat itu Hariman Siregar masih tercatat sebagai anggota Golkar. Menjelang pelantikan, Hariman menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Golkar. Karena menurut Hariman dipilihnya ia menjadi ketua Dewan Mahasiswa UI adalah oleh mahasiswa bukan oleh Golkar (Hasibuan, 2011, hlm. 37).

Hariman merupakan mahasiswa yang pada awalnya dekat dengan Ali Moertopo, bahkan posisinya sebagai Ketua Dewan Umum Mahasiswa UI berkat bantuan dari Ali Moertopo melalui kelompok 10 yang merupakan anak-anak binaan Ali Moertopo. Namun setelah Hariman menjadi Ketua Dewan Mahasiswa, saat penyusunan Kabinet Dewan Mahasiswa UI, Hariman malah memilih Ketua Komisariat HMI UI sebagai Sekjen Dewan Mahasiswa UI. Padahal, orang-orang Opsus termasuk Ali Moertopo mewanti-wanti agar Hariman tidak melibatkan aktivis HMI (Hasibuan, 2011, hlm. 37).

Selain Hariman Siregar, ada mahasiswa lain perannya cukup penting dalam pembahasan ini, yakni Sjahrir. Pada saat itu Sjahrir merupakan mahasiswa yang aktif menyerukan aspirasi rakyat namun bukan anggota dari DMUI, Sjahrir juga merupakan juru bicara dari Grup Diskusi Universitas Indonesia (GDUI). Bersama Hariman

Siregar dan anggota DMUI lainnya, Sjahrir menyeruakan aspirasi rakyat dalam menentang modal asing (Hasibuan, 2011, hlm. 30).

Demonstrasi terus berlanjut sampai tanggal 9 Januari, demonstrasi-demonstrasi tersebut bertepatan penentangan terhadap Asisten Pribadi Presiden. Di Jakarta dan Bandung terjadi pembakaran boneka-boneka yang menggambarkan Soedjono Hoemardani dan Perdana Menteri Jepang, Tanaka. Para Aspri menyerang balik mahasiswa, mereka menuduh mahasiswa telah ditunggangi oleh kekuatan luar yang anti Soeharto. Tanggal 11 Januari, Presiden Soeharto menerima delegasi Dewan-Dewan Mahasiswa yang menyampaikan kecaman dan mempertanyakan kewibawaan presiden yang dirongrong tingkah laku para pemimpin yang memperkaya diri secara tidak sah.

Pertemuan antara delegasi mahasiswa dan Presiden Soeharto tidak menghasilkan apa-apa karena presiden tidak mengambil keputusan apapun. Dari situlah kemudian mahasiswa melalui sebuah Apel Siaga Mahasiswa di Kampus UKI pada tanggal 12 Januari mengajak masyarakat untuk menyambut Perdana Menteri Tanaka dengan gerakan aksi. Mahasiswa juga mengajak masyarakat untuk memasang bendera setengah tiang pada hari kehadiran Perdana Menteri Tanaka, selain itu juga mengajak Koran untuk memboikot pemberitaan tentangnya, dan mengadakan aksi total pada tanggal 15 Januari 1974 (Syukur, 2012, hlm. 356-358).

Pada tanggal 15 Januari 1974 para demonstran menuju ke istana dan coba menerobos istana negara. Istana ketika itu menjadi tempat pertemuan antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Tanaka, yang bertemu sejak tanggal 14 Januari 1974. Entah siapa yang memulai, demonstrasi murni anti Jepang itu malah berubah menjadi kerusuhan massal. Pada siang harinya, tiba-tiba proyek Senen, pabrik coca-cola, *show room* Toyota Astra, dan sejumlah tempat di Jakarta dibakar, dirusak, dan dijarah massa. Sebelas orang tewas ditembak dan ratusan korban luka-luka. Ratusan kendaraan buatan Jepang mendadak menjadi besi gosong. Penjarahan terjadi di mana-mana. Mereka mengambil segala perhiasan emas dan permata, barang-barang elektronik, pakaian sampai mebel. Di sepanjang jalan Keramat Raya, puluhan mobil dibakar massa. Gedung Astra di jalan Jenderal Sudirman rusak berat dilempari

berbagai macam benda. Kerusakan juga terjadi hampir di sebagian besar jalan Gajah Mada serta Hayam Wuruk (Ali, 2012)

Para mahasiswa dan pemuda kota yang miskin membakar sekitar 800-an lebih mobil dan seratus gedung, dan merampok banyak toko yang menjual produk-produk Jepang. Di lain tempat, diperkirakan 20.000 orang mengelilingi rumah tamu Tanaka, sementara 5.000 orang mengelilingi istana kepresidenan. Baru setelah hari kedua peristiwa inilah Kopkamtib bertindak, penundaan yang menambah kecurigaan bahwa Soemitro bermurah hati kepada para demonstran atau berusaha menggunakan krisis negara untuk kepentingan politiknya (Ricklefs, M.C, 2008, hlm. 619). Gerakan ini berakhir dengan kerusuhan anti-Jepang. Tercatat 11 orang meninggal, 300 luka-luka, dan 775 ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak dan dibakar, 144 bangunan dirusak, serta 160 kilogram emas hilang dijarah. Gerakan demonstrasi mahasiswa yang berujung kerusuhan anti Jepang pada tanggal 15 Januari ini kemudian dikenal dengan Malapetaka 15 Januari atau Malari (Goenawan, 2015, hlm. 143).

Dari pemaparan di atas, penulis beranggapan bahwa peristiwa Malari bukan hanya demonstrasi untuk menentang modal asing dan menuntut politik negara yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Terlihat saat kejadiannya terjadi bentrokan yang tidak diperkirakan sehingga merenggut korban jiwa dan menimbulkan kerugian yang besar. Karena hal itu, penulis beranggapan bahwa terjadinya peristiwa ini tidak terlepas dari kepentingan oknum-oknum tertentu. Seperti yang ditulis oleh Cahyono dalam bukunya yang berjudul *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74* bahwa ada organisasi di bawah Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani, dimana anggota-anggota dalam organisasi tersebut merupakan orang-orang eks DI/TII dan GUPPI (Gerakan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia). Kemudian saat terjadinya peristiwa Malari, lewat organisasi tersebut Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani melakukan pengarahannya massal lewat Ramadi dan Kiai Nur dari Banten. Massa diarahkan untuk merusak mobil Jepang, kantor Toyota Astra dan Coca-cola. Kegiatan tersebut dilakukan untuk merusak citra mahasiswa dan memukul duet Soemitro-Sutopo Juwono (Cahyono, 1998, hlm. 166).

Sebaliknya dalam “Dokumen Ramadi” diungkapkan rencana Soemitro menggalang kekuatan di kampus-kampus sehingga akhirnya “ada seseorang jenderal berinisial S akan merebut kekuasaan dengan menggulingkan presiden sekitar bulan April hingga Juni 1974. Revolusi sosial pasti meletus dan Pak Harto bakal jatuh”. Tudingan dalam “dokumen Ramadi” itu tentu mengacu kepada Jenderal Soemitro (Adam, 2009, hlm. 129-130).

Rivalitas Ali Moertopo dan Soemitro juga dijelaskan dalam penelitian terdahulu yang penulis temukan berupa skripsi sarjana tidak diterbitkan yang berjudul “Rivalitas Soemitro dan Ali Moertopo dalam Kancah Perpolitikan di Indonesia 1971-1974” bahwa peristiwa Malari merupakan gerakan sosial yang sengaja dipolitisi oleh dua tokoh militer yaitu Mayjen Ali Moertopo dan Jenderal Soemitro untuk saling menjatuhkan. Begitupun menurut artikel yang ditulis oleh Aas Lailah, Iskandar Syah dan Syaiful M berjudul “Analisi Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa Malapetaka 15 Januari (MALARI) 1974” diterbitkan dalam jurnal *Pendidikan dan Penelitian Sejarah* yang beranggapan sama bahwa peristiwa Malari dilatarbelakangi oleh rivalitas kedua tokoh militer tersebut.

Kalaupun benar demikian, lalu bagaimana pandangan Mayjen Ali Moertopo dan Jenderal Soemitro sendiri terhadap peristiwa Malari ini? Hal ini menarik perhatian penulis untuk mencoba menggali informasi akan jawaban dari pertanyaan tersebut. Penulis akan mencoba mencari informasi melalui biografi-biografi kedua tokoh tersebut. Untuk lebih melengkapi pembahasan, penulis akan menambahkan beberapa tokoh yang juga merupakan saksi sejarah peristiwa Malari, seperti Presiden Soeharto, Mayjen Soedjono Hoemardani, Hariman Siregar dan Sjahrir. Penulis merasa keempat tokoh ini memiliki peran penting dalam peristiwa Malari. Seperti Presiden Soeharto yang menyetujui kebijakan penanaman modal asing (Dwipayana, G, 1989, hlm. 246), dimana hal ini merupakan awal permasalahan dari peristiwa Malari. Mayjen Soedjono Hoemardani yang merupakan Asisten Pribadi Presiden Soeharto bidang Ekonomi. Soedjono menjadi jembatan penghubung antara pengusaha-pengusaha Jepang yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Sedangkan Hariman Siregar yang pada saat itu merupakan ketua umum Dewan

Mahasiswa UI adalah pemimpin dari aksi demonstrasi mahasiswa murni untuk menentang modal asing khususnya Jepang, dalam biografinya yang berjudul *Hariman dan Malari Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing* dikatakan bahwa Hariman sendiri tidak menyangka bahwa aksi demonstrasinya yang bertujuan untuk menentang modal asing berakhir menjadi anarkis (Hasibuan, 2011, hlm 52). Terakhir Sjahrir merupakan mahasiswa yang memiliki peran dalam peristiwa Malari, dan merasakan dampak dari terjadinya peristiwa tersebut (Ezer, 2008).

Penulis merasa topik ini menarik untuk dikaji, mengingat peristiwa Malari merupakan bagian dari *The Dark History* Indonesia yang pada perkembangannya dibahas berbeda-beda sesuai kepentingan. Apalagi jika berbicara mengenai dalang dibalik peristiwa Malari. Dimana beberapa tokoh diduga sebagai dalang dari peristiwa tersebut, selain Ali Moertopo dan Soemitro ternyata ada juga versi yang mengatakan bahwa Soeharto sebagai dalang dari peristiwa Malari. Dari pernyataan tersebut, penulis ingin melihat mengenai peristiwa Malari berdasarkan sudut pandang tokoh-tokoh yang terlibat melalui analisis biografi tokoh-tokoh tersebut. Dengan demikian penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai pandangan para pelaku sejarah terhadap peristiwa Malari dengan rumusan judul sebagai berikut “Peristiwa Malari Dalam Pandangan Para Pelaku Sejarah (Sebuah Kajian Analisis Biografi)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah utama yang akan dibahas dalam kajian penelitian yaitu, Bagaimana Peristiwa Malari dalam Pandangan Para Pelaku Sejarah? Masalah penelitian di atas akan dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan para pelaku sejarah peristiwa Malari?
2. Bagaimana proses terjadinya peristiwa Malari?
3. Bagaimana peranan para pelaku sejarah peristiwa Malari dalam peristiwa tersebut?

4. Bagaimana perbedaan dan persamaan pandangan antara para pelaku sejarah peristiwa Malari terhadap peristiwa tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok pemikiran di atas, menjawab dan memecahkan rumusan masalah yang ada merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh penulis. Secara umum, tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai Peristiwa Malari dalam Pandangan Para Pelaku Sejarah. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan latar belakang kehidupan para pelaku sejarah peristiwa Malari.
2. Mengidentifikasi proses terjadinya peristiwa Malari.
3. Mengidentifikasi peranan para pelaku sejarah peristiwa Malari dalam peristiwa tersebut.
4. Menganalisis perbedaan dan persamaan pandangan antara para pelaku sejarah peristiwa Malari terhadap peristiwa tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat secara umum dari penelitian ini adalah sebagai pengetahuan tentang pandangan Ali Moertopo dan Soemitro terhadap peristiwa Malari. Sedangkan manfaat khusus dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Memperkaya khasanah sejarah nasional, terutama sejarah pada masa Orde Baru.
2. Menambah pengetahuan mengenai peristiwa demonstrasi mahasiswa pada tanggal 15 Januari 1974 yang dikenal sebagai peristiwa Malari (Malapetaka lima belas Januari).
3. Menambah referensi mengenai pandangan Ali Moertopo, Soemitro, dan para pelaku sejarah lainnya terhadap peristiwa Malari (Malapetaka lima belas Januari).

4. Memperkaya penulisan karya tulis ilmiah mengenai perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 1974 di lingkungan Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia.
5. Menambah kontribusi terhadap pembelajaran Sejarah di SMA. Khususnya pada materi yang membahas pemerintahan Orde Baru.

1.5. Struktur Organisasi

Hasil dari penelitian ini akan disusun kedalam lima BAB yang terdiri dari Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Pembahasan, Kesimpulan dan Saran. Adapun fungsi dari pembagian ini bertujuan untuk memudahkan penulisan agar sistematis.

Bab I Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang penelitian yang didalamnya berisi penjelasan mengapa masalah tersebut diteliti dan penting untuk diteliti. Bab ini juga berisi perumusan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan untuk mempermudah peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini penulis memaparkan secara lebih terperinci mengenai teori yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Kajian-kajian yang bersifat teoritis tersebut dijadikan landasan pemikiran yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi mengenai “Peristiwa Malari Dalam Pandangan Para Pelaku Sejarah (Sebuah Kajian Analisis Biografi)”.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai metode atau cara-cara yang akan dilaksanakan dalam melakukan penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian historis serta studi literatur. Teknik penulisannya disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan berdasarkan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD).

Bab IV Peristiwa Malari Dalam Pandangan Para Pelaku Sejarah (Sebuah Kajian Analisis Biografi). Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai biografi tokoh-

tokoh yang merupakan para pelaku sejarah peristiwa Malari yakni Ali Moertopo, Soemitro, Soeharto, Soedjono Hoemardani, Hariman Siregar dan Sjahrir serta pandangannya terhadap peristiwa Malari. Kemudian dalam bab ini pula, penulis akan mengkaji mengenai perbedaan dan persamaan pandangan antara tokoh-tokoh tersebut terhadap peristiwa Malari.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan inti jawaban dan analisis peneliti terhadap masalah-masalah secara keseluruhan yang merupakan hasil dari penelitian. Hasil akhir ini merupakan hasil penelitian serta interpretasi penulis mengenai inti dari pembahasan. Pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang didapatkan setelah mengkaji permasalahan yang telah diajukan sebelumnya. Selain itu, penulis juga memberikan saran-saran yang ditujukan kepada para pembaca yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan Peristiwa Malari serta tokoh-tokoh yang menjadi pelaku sejarah peristiwa tersebut agar dapat menciptakan karya ilmiah yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Abdullah, B. (1991). *Investasi asing dan industrialisasi di Indonesia*. Jakarta: LP3S.
- Adam, A. (2009). *Membongkar manipulasi sejarah kontroversi pelaku dan peristiwa*. Jakarta: Kompas.
- Cahyono, H. (1998). *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan peristiwa 15 Januari '74*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dwipayana, G dan Ramadhan, K.H. (1989). *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*. Jakarta: Citra Kharisma Bunda.
- Goenawan, M. (2015). *Detik-detik paling menegangkan rangkaian peristiwa mencekam menjelang kejatuhan Soekarno dan Soeharto*. Yogyakarta: Palapa.
- Hasibuan, I dan Daulay, A. (2011). *Hariman dan Malari gelombang aksi mahasiswa menentang modal asing*. Jakarta: U-Communication.
- Poesponegoro, M.D dan Notosusanto, N. (1993). *Sejarah nasioanl Indonesia jilid vi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmat, M. (2011). *Ali Moertopo dan dunia intelijen Indonesia*. Yogyakarta: Narasi.
- Ramadhan K.H. (1994). *Soemitro (mantan Pangkopkamtib) dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ricklefs, M.C. (2010). *Sejarah Indonesia modern*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Syukur, A, dkk. (2012). *Indonesia dalam arus sejarah orde baru dan reformasi*. Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve.
- Wanadi, S dkk (1987). *Soedjono Hoemardani pendiri CSIS 1918-1986*. Jakarta: CSIS.
- Windy, A, dkk. (2005). *100 tokoh yang merubah Indonesia: Biografi singkat 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia di abad 20*. Yogyakarta: PT Agromedia Pustaka.

Skripsi:

- Astutik, I. (2006). “Rivalitas Soemitro dengan Ali Moertopo dalam kancah perpolitikan Indonesia 1971-1974”. *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Malang. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UM.

Jurnal dan Artikel:

- Hakim, Abdul, dkk. (2012). “Perbandingan perekonomian dari masa Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945-2009)” dalam *Jurnal Ekonomika-Bisnis*. Vol. 3. No. 2.

Lailah, Aas, dkk. (2013). “Analisis faktor penyebab terjadinya peristiwa malapetaka 15 Januari (MALARI) 1974” dalam *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*. Vol 1. No 2.

Surat Kabar dan Majalah:

Ali, A. (2012, 16 Januari). 15 Januari 1974, sebuah tragedy. *Kompas*.

Astono, B. (2015, 26 Juni). Negara genting dan suasana Jakarta mencekam. *Kompas*, hlm 46.

Setiadi, P, dkk. (2013, 20 Oktober). Rahasia-rahasia Ali Moertopo. *Tempo*, hlm 32-159.